

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh dimasa lalu menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Penitik berat pembangunan masa lalu hanya kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatan penambahan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata.

Meskipun demikian pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada produksi nasional, tidak disertai pembangunan dan perkuatan institusi-institusi baik publik maupun institusi pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh represi dan keterpurukan telah melumpuhkan berbagai institusi strategis seperti sistem hukum dan peradilan

untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balance*), dan sistem sosial yang diperlukan untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai.¹

Tujuan akhir pembangunan nasional adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena itu setiap upaya pembangunan harus selalu merupakan upaya pengamalan Pancasila. Mengamalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa berarti bahwa setiap sila harus diamalkan yaitu: sila pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai cara atau metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya..

Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia memerlukan komitmen yang sangat tinggi dan jangka waktu yang panjang. Proses pengembangan itu merupakan proses pemberdayaan yang sangat sulit, harus dilakukan secara bertahap dan diikuti oleh semua yang terlibat, terutama para peserta yang dibangun, tanpa bisa diwakilkan. Karena kualitas keluarga yang

¹ Moch. Faisal Salam, *penyelesaian perselisihan perburuhan industrial di Indonesia*, (Bandung; Mandar Maju, 2009), h.14

relatif rendah, maka pemberdayaan Sumber Daya Manusia itu dilakukan dengan pertama-tama, atau minimal sekaligus, memberdayakan keluarga sebagai lembaga yang pertama dan utama dari setiap insan anggotanya.

Masalah pengangguran dan kemiskinan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama di setiap Negara di dunia khususnya di negara yang sedang berkembang. Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Dualisme tersebut terjadi, jika pemerintah tidak mampu memanfaatkan dan meminimalkan dampak yang diakibatkan dari dua permasalahan tersebut dengan baik. Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada, maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Demikian sebaliknya jika pemerintah tidak mampu memanfaatkan maka akan menciptakan dampak negatif yaitu mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari sudut pandang positif tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun dari sudut pandang yang lain meningkatnya tenaga kerja justru sering kali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Sebagai akibat dari kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penduduk yang ada, sehingga tenaga kerja yang ada tidak terserap secara penuh, konsekuensinya terciptalah pengangguran.²

Keberhasilan sebuah pemerintahan termasuk pemerintahan di Kabupaten Serang dalam hal pembangunan dapat dinilai melalui seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru dan semakin bertambah akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada sehingga

² Ahmad Soleh, "Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia" Jurnal Ilmiah Cano Economos Vol.6 No. 2 Juli 2017

terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis kepada warga di wilayah kecamatan Carenang, bahwa diketahui sejauh ini adalah adanya faktor – faktor atau penyebab dari pengangguran yang semakin terbuka lebar dikarenakan minimnya informasi lowongan kerja dan terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan serta sedikit upaya pemerintah daerah dalam mengadakan pelatihan sumber daya manusia demi menunjang *skill* atau kemampuan calon pencari kerja.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka saya ingin meneliti skripsi dengan judul “TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA PENGURANGAN PENGANGGURAN (Studi di Kecamatan Carenang)”

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pengangguran di Kecamatan Carenang ?
2. Bagaimana langkah pemerintah daerah Kabupaten Serang untuk mengatasi masalah pengangguran di Kecamatan Carenang?
3. Bagaimana implikasi hukum pemberlakuan Perda Nomor 6 tahun 2019 terhadap pengurangan angka pengangguran di Kecamatan Carenang?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap pengurangan pengangguran di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketenagakerjaan.

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui factor apa yang menjadi penyebab pengangguran di Kecamatan Carenang.
2. Untuk mengetahui langkah pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran di Kecamatan Carenang.
3. Untuk mengetahui dampak hukum dari peraturan daerah Nomor 6 tahun 2019 terhadap pengurangan angka pengangguran di Kecamatan Carenang.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial pada khususnya dan dapat dijadikan bahan masukan untuk

proses penelitian yang akan datang. Berhubungan dengan pengurangan pengangguran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pengangguran.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Nama Penulis/Judul skripsi/tahun	Perbedaan Pembahasan Penelitian	
	Pembahasan Terdahulu	Pembahasan Penulis
1. Faro Amaliya UIN SMH BANTEN/ pengaruh upah minimum dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi banten 2011 – 2015	1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi banten 2. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka	1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pengangguran di Kecamatan Carenang. 2. Bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi masalah pengurangan pengangguran di

	di provinsi banten	Kecamatan Carenang. 3. Bagaimana implikasi hukum pemberlakuan Perda Nomor 6 tahun 2019 terhadap pengurangan angka pengangguran di Kecamatan Carenang?
1. Epi Sopiah UIN SMH BANTEN/ pengaruh pengangguran, tenaga kerja dan pendidikan terhadap produk domestic regional bruto (PDRB) di	1. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap produk domestic regional bruto di banten. 2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap produk regional bruto di provinsi banten.	1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pengangguran di Kecamatan Carenang. 2. Bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi masalah pengurangan pengangguran di

provinsi Banten 2010 – 2015		Kecamatan Carenang. 3. Bagaimana implikasi hukum pemberlakuan Perda Nomor 6 tahun 2019 terhadap pengurangan angka pengangguran di Kecamatan Carenang?
------------------------------------	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai hubungan kerja, baik pada masa pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek public, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah

ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum public.

Berdasarkan undang- undang no. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pasal 5 UU 13/2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh

pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contoh: dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan dan sebagainya.

b. Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Sebagai contoh: supir, tukang jahit, montir dan sebagainya.

c. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga, tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contoh: kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar dan sebagainya.

Klasifikasi diatas mendorong pengaturan terkait pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Bab V UU

13/2013, agar kualifikasi tenaga kerja Indonesia dapat semakin baik.

Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan, pelaku usaha dan tenaga kerja mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui ikatan atau perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis atau lisan dan dilandasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja juga menjadi perhatian demi menciptakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas pekerjaan.

Apabila timbul perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja, maka hukum yang mengatur adalah Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Setiap bentuk perselisihan memiliki cara atau prosedur yang berlaku dan harus diikuti oleh kedua belah pihak baik itu melalui cara berunding, mediasi, konsiliasi, arbitrase maupun diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan.³

Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang – undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah.⁴

³ <https://www.dslalawfirm.com/id/pengertian-masalah-peraturan-ketenagakerjaan/>

⁴ “Otonomi daerah” [http:// www.m.wikipedia.org/wiki/otonomi daerah](http://www.m.wikipedia.org/wiki/otonomi_daerah) diakses pada 11 Okt. 2018, pukul 20:17 WIB

1. Anjuran Bekerja Menurut Syariat Islam

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang *halalan thayiban* termasuk kedalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukum Islam. Dengan demikian bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam.

Rasulullah, para nabi dan para sahabat adalah para professional yang memiliki keahlian dan pekerja keras. Mereka selalu menganjurkan dan meneladani orang lain untuk mengerjakan hal yang sama.

Adapun dalil yang berkaitan dengan bekerja adalah sebagai berikut:

a. Ayat Al-qurán

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “*dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang – orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”* (Q.S. At-taubah :105)

b. Hadist

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ
عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ هَيْرًا
مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

Artinya. “*Tidak ada seseorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.*” (H.R. Bukhari 1930)

2. Defisini Tentang Tenagakerja

a. Menurut Payaman J. Simanjuntak

Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Tenaga

kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh usia.⁵

b. Menurut Lewis

adanya adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa pindahan pekerja dari subsistem 1 c sector kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi terlalu banyak. banyak tenaga kerja akan mendorong tingkat produktivitas lebih banyak lagi dan dapat dinikmati dengan cepat oleh masyarakat banyak.⁶

c. Menurut Keynes

berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat

⁵ Agus midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, dinamika dan kajian teori* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).h. 6

⁶ Mulyadi, *ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan*. h. 58

pekerja (Labour Union) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan upah.

d. Menurut Ester Boserup

berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk justru menyebabkan dipakainya sistem pertanian yang lebih intensif disuatu masyarakat dan meningkatnya output di sector pertanian. Boserup juga berpendapat bahwa penambahan penduduk berakibat dipilihnya sistem teknologi pertanian pada tingkatan yang lebih tinggi.

3. Definisi Tentang Teori Ekonomi

a. A. C. Pigou

mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai sebuah kajian dalam rangka untuk menambahkan jumlah pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup.

b. Willian Beveridge

Mendefinisikan ekonomi sebagai sebuah kajian mengenai berbagai cara manusia untuk bekerja sama dalam upaya mendapatkan keperluan material.

c. J. S. Mill

Ekonomi berarti suatu ilmu yang berhubungan dengan pengeluaran Negara.⁷

d. Achmad Reza Widjaja Ph.D

Memaparkan mengenai investasi yang dapat menekankan pada beberapa keahlian terutama yang menyangkut *problem solving skills, learning skills, communication skills, self management of personal skills, dan social skills.*⁸

4. Jenis – jenis Pengangguran

a. Setengah Menganggur.

Orang - orang yang termasuk dalam setengah menganggur adalah ketika tenaga kerja yang tidak

⁷ Definisi Teori ekonomi dan Tokoh-Tokohnya, [HTTP://Obrolanekonomi.blogspot.com/](http://obrolanekonomi.blogspot.com/), diakses pada 10 Oktober 2019, pukul 12: 20 WIB

⁸ Apa kata pakar ekonomi Indonesia tentang proyeksi Indonesia 2018, [HTTPS://www.bakrie.ac.id/](https://www.bakrie.ac.id/), diakses pada 10 Oktober 2019, pukul 12: 30 WIB

bekerja dengan maksimal. Biasanya pengangguran jenis ini juga memiliki jam kerja kurang dari 35 jam perminggu.

b. Pengangguran Friksional.

Pengangguran friksional terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena banyak hal akan tetapi biasanya letak geografis dan kekurangan informasi menjadi penyebab utamanya. Tak hanya itu, pencari kerja yang berhenti karena mencari kesempatan yang lebih baik.

c. Pengangguran Struktural.

Pengangguran structural terjadi ketika adanya perubahan dalam sektor ekonomi yang menciptakan ketidakcocokan antara keterampilan yang dibutuhkan oleh pengusaha. Selain itu resesi yang panjang sering menciptakan jenis pengangguran structural. Para pekerja yang menganggur terlalu lama perlahan akan kehilangan keterampilan mereka dan kondisi ini

menyebabkan peningkatan pengangguran alami yang lebih tinggi.

d. Pengangguran Musiman.

Sesuai dengan namanya, jenis pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim di suatu daerah atau negara. Misalnya saja petani, mereka hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen tetapi setelah itu mereka akan menganggur.

e. Pengangguran Teknologi.

Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang cukup sering terjadi di era saat ini. Pengangguran ini terjadi karena bidang – bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia, sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan dengan teknologi.

f. Pengangguran Siklis.

Jenis pengangguran ini disebabkan karena pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari siklus

bisnis atau fluktuasi ekonomi seperti resesi. Ketika ekonomi sedang naik, perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja, dan tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang bergerak ke bawah, pengangguran meningkat, ketika perusahaan membiarkan pekerja pergi, dan berhenti mempekerjakan mereka dengan cepat sebelum pensiun, seperti yang mereka lakukan dalam periode ekonomi yang kuat.⁹

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisi data bersikap induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

⁹ <https://smartpresence.id> > Pekerjaan

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan setelah dilakukan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan kenyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetapi lebih menerapkan pada makna.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, segala kegiatan yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya).

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan pengangguran.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Desa Teras Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan *field research* yang cara pengumpulannya dengan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara (Interview), teknik wawancara yang digunakan ialah terstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan melalui pedoman wawancara.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan.
- d. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data mempelajari bahan dari literature yang berhubungan dengan penelitian atau membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, artikel, naskah, dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, lalu penulis menjabarkan secara garis besar mengenai apa yang dikemukakan tiap-tiap bab yaitu :

BAB I : pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Fokus penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif Penelitian yang membahas letak geografis Kecamatan Carenang, Demografis Kecamatan Carenang, Kondisi Pendidikan, Kondisi Sarana peribadatan

BAB III : Kajian Teori Tentang Ketenagakerjaan yang membahas tentang Pengertian Ketenagakerjaan, Hirarkhi Perundang-undangan, serta Peran dan fungsi pemerintah dalam pengurangan pengangguran.

BAB IV : Implementasi Perda Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketenagakerjaan, berisi tentang Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pengangguran di Kecamatan Carenang, Peran atau langkah pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di Kecamatan Carenang, dan implikasi hukum pemberlakuan Perda Nomor 6 tahun 2019 terhadap pengurangan angka pengangguran di Kecamatan Carenang.

BAB V : Penutup, Meliputi : Kesimpulan dan Saran